

PENUTUP

A. Kesimpulan

Surat Roma merupakan surat yang dituliskan Paulus dari Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua, untuk orang percaya di kota Roma. Maksud penulisan penting dari penulisan sura ini adalah untuk menengahi ketegangan yang terjadi antara orang keturunan Yahudi dan orang bukan Yahudi lainnya. Selain itu, Paulus merasa perlu menasihatkan orang Kristen di Roma karena berada dalam pengawasan ketat pemerintah. Kekristenan memberi pengawasan yang ketat dikarenakan ketidakmampuan membayar pajak dan penolakan untuk menyembah kaisar. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, pembayaran pajak yang selangit membuat rakyat menghabiskan perbendaharaan untuk dijual, hal ini mengakibatkan rakyat tidak dapat lagi membayar pajak yang selangit dan hal inilah yang dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

Paulus menuliskan surat Roma, ketika Nero menetapkan jumlah pajak yang selangit akibat pemborosannya dan mengizinkan kembali orang-orang Yahudi yang diasingkan dari kota masuk kembali ke kota Roma serta memberlakukan lagi adanya kebijakan mengenai pemujaan terhadap kaisar. Kebijakan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh rakyat, sebab rakyat kehabisan perbendaharaan membayar pajak. Selain itu, orang Kristen juga menolak menyembah kepada kaisar oleh karena keimanannya, sikap inilah yang dinilai sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah.

Dari antara surat Paulus lainnya, surat Roma merupakan surat dengan surat dengan uraian yang cukup rinci dan praktis (bila dibanding dengan surat Paulus lainnya) berkaitan dengan hubungan antara gereja dan pemerintah. Paulus menasihatkan agar jemaat takluk (Rm. 13: 1,5) yang artinya patuh kepada pemerintah dan kepada peraturan serta kebijakannya selama tidak menyimpang dari kehendak

Allah, kepatuhan ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap Allah sebab pemerintah adalah representasi Allah untuk menjalankan tatanan dunia. Kepatuhan seorang Kristen juga adalah bentuk dari tanggung jawabnya secara sosial, sebab jika seorang patuh (mis. melakukan pembayaran pajak) sesungguhnya ia bukan hanya menyelamatkan dirinya namun juga sesamanya untuk tidak mendapatkan hukuman.

Kepatuhan ini juga menuntut adanya relasi sebagai mitra, artinya kepatuhan yang dijalankan adalah kepatuhan yang kritis. Jika pemerintah bertindak lalim dan menyimpang, maka gereja mesti menyuarakan suara kenabian sebagai mitra dalam rasa tanggung jawab terhadap Allah. Kepatuhan gereja terhadap pemerintah secara implisit mengundang pemerintah untuk juga mesti takut melakukan kesalahan. Pihak pemegang kekuasaan mestinya juga perlu takut terhadap Allah dan rakyatnya jika rakyat telah menjalankan kepatuhan namun mereka justru tidak menjalankan tugas dengan baik, inilah relasi timbal balik antara gereja dan pemerintah.

Demi adanya hubungan dialogis mutualis antara GMIT dan pemerintah maka perlulah GMIT menjadi lembaga yang berpelayanan dan bermitra secara kritis. Perhatian terhadap pemerintah dalam ranah lokal menjadi jalan pertama yang mesti dilalui GMIT sebelum tiba pada kajian dan perhatian GMIT yang bersifat nasional. Dengan jalan demikian, pengupayaan masyarakat dan tatanan sejahtera menjadi rata.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kajian di atas penulis memberikan beberapa saran:

1. Gereja

Paham bahwa urusan berkaitan dengan pemerintah adalah tabu dan kotor tidak boleh diinternalisasikan dalam eksistensi gereja. Gereja tidak hanya bertugas dalam pusat pertumbuhan spiritual dan kelembagaan rohani, namun juga untuk berpartisipasi dalam urusan sosial, termasuk urusan dengan tatanan pemerintah.

Tugas kelembagaan GMIT dalam hubungan dengan pemerintah, bukan hanya sebatas memberi perhatian, dan tidak bertindak. Gereja tidak boleh diam, sebab keberdamaian gereja adalah bentuk dukungan terhadap kebijakan yang timpang. Kajian terhadap kebijakan pemerintah dalam ranah lokal perlu mendapat perhatian penting, selain kerja sama yang telah berlangsung. Upaya ini membantu GMIT untuk mengetahui pihak-pihak yang perlu mendapat fokus terhadap suara kenabian dan tindakan pastoral yang patut diberikan. Selain itu, GMIT perlu membuat kajian teologis terhadap permasalahan-permasalahan dalam bidang pemerintahan, sehingga kajian GMIT yang awalnya bersifat sosial dapat mendarat pada konteks yang tepat sesuai dengan hakikat GMIT dan konteks yang sedang dihadapi.

2. Pemerintah

Setiap individu dalam tatanan pemerintahan mesti menyadari benar tugasnya sebagai hamba yang bekerja untuk Allah. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, pemerintah tidak berkuasa penuh dan tidak dapat menempatkan diri sebagai tuan. Kesadaran demikian membawa pemerintah untuk bertindak berdasarkan kehendak Allah bukan kehendak pribadi, dan dapat mengupayakan konsep masyarakat yang sejahtera. Keadilan mesti dinyatakan dalam urusan bersama. Pemerintah atau masyarakat yang bertindak menyimpang mesti mendapat hukuman yang sesuai demi terciptanya tatanan yang seimbang.

3. Masyarakat (Keluarga)

Pengembangan karakter yang baik selalu dimulai dari lingkungan dimana seorang bertumbuh. Untuk itu, perlulah setiap orang dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama mengupayakan lingkungan yang baik dan menjadi tempat bertumbuh yang tepat. Penanaman rasa tanggung jawab, budi pekerti luhur dan pengenalan nilai

spiritualitas yang benar merupakan langkah penting membangun pola lingkungan yang sehat.